ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2008-2010

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

Suryo Raharjo

B 200080024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2012

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2008-2010. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Boyolali. Sedangkan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2008-2010. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.

Metode penelitian yang dilakukan adalah Deskriptif Komparatif, dengan menggunakan beberapa Rasio Keuangan yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Efisiensi, Rasio Pertumbuhan, Rasio Pertumbuhan Kekayaan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerahyang ditunjukkan angka rasio rata-rata adalah 9,73% masih berada diantara 0%-25% dan tergolong mempunyai pola hubungan Instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan sosial masyarakat masih sangat rendah. (2). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sudah berjalan efektif dan efisien. Rasio Efektifitas sudah mencapai 100% berarti kinerjamya sudah efektif. Rasio Efisiensi kurang dari 100% berarti kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sudah efisien. (3). Berdasarkan Rasio Pertumbuhan menunjukkan bahwa Rasio Pertumbuhan PAD mengalami kenaikan yaitu 9,84% dan 23,54%. Dan untuk Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan juga mengalami kenaikan yaitu 6,85% dan 9,77%. Sedang Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan yaitu dari 12,73% menjadi 13%. Dan untuk Rasio Pertumbuhan Belanja Modal mengalami kenaikan yaitu dari (30,46%) menjadi 15,60%. Dan untuk Rasio Pertumbuhan Kekayaan Daerah mengalami penurunan dan kenaikan yaitu 72,56%, (27,53%) dan 12,06%.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca skripsi dengan judul:

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2008-2010.

Yang ditulis oleh:

SURYO RAHARJO

B 200 080 024

Penandatangan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 2012

Pembimbing

(Drs. Eko Sugyianto, M.Si.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Triyono, SE, M.Si.)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Lembaga pemerintahan sebagai organisasi nir laba mempunyai tujuan bukan mencari kepentingan tetapi semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misal peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keamanan.

Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan Laporan Keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan dalam periode waktu tertentu.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif (Mardiasmo, 2002:121).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diambil adalah: “Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Boyolali, jika dilihat dari analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008-2010?”.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah lebih terfokus pada kinerja keuangan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2008-2010.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Mengetahui posisi keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2008-2010.
b. Mengetahui perbedaan kondisi keuangan di Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2008-2010.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anggaran Sektor Publik

1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya seperti

pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun proyek-proyek sektor publik dan swasta (Indra Bastian, 2001:6).

2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik, bagi pemerintah dari perencanaan strategis, pembuatan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan sehingga dapat memperbaiki efisiensi dan efektifitas sektor publik (Mardiasmo, 2002:14).

B. Tinjauan Keuangan Daerah

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut PP No:58 Tahun 2005, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

2. Pengelolaan Penerimaan Daerah

Pendapatan daerah, yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Permendagri No:13 tahun 2006 dan UU No:17 tahun 2003).

3. Pengelolaan Pengeluaran Daerah

a). Belanja daerah

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai ekuitas dana sebagai kewajiban daerah dalam satu anggaran serta tidak

akan diperoleh pembayaranya kembali oleh daerah. Belanja juga dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja (Sony Yuwono dkk, 2007:96).

b). Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus serta penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pengertian APBD

Definisi APBD menurut Undang-Undang No 58 tahun 2005 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ditetapkan oleh Peraturan daerah.

2. Fungsi Anggaran Daerah

a). Fungsi APBD menurut Permendagri No 13 tahun 2006:

(1). Otorisasi

(2). Perencanaan

(3). Pengawasan

(4). Alokasi

(5). Distribusi

(6). Stabilisasi

3. Prinsip-prinsip Anggaran Daerah

Prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2002:67-68) meliputi:

a). Otorisasi.

b). Komprehensif.

c). Keutuhan Anggaran.

d). *Mendiscretionary Appropriation* (bebas menentukan kebijakan).

e). Periodik.

f). Akurat.

g). Jelas.

h). Diketahui Publik.

D. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No:13 tahun 2006, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Manfaat pengukuran kinerja (Mardiasmo, 2002:122)

1). Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.

2). Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

3). Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

4). Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

5). Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

E. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Rasio menurut Helfert (1996:67) adalah suatu angka yang menunjukan hubungan antara suatu besaran dengan besaran lainya dalam laporan keuangan.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Sebagai pedoman dalam melihat tingkat hubungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)
Rendah sekali	0-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber: Abdul Halim (2002:169)

2. **Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah**.

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Kegunaan dari rasio ini adalah untuk Pemerintah Daerah yaitu untuk mengukur efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan *(growth ratio)* mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan mengikat keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Rasio ini sangat berguna bagi pemerintah daerah, yaitu untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

4. Rasio Pertumbuhan Kekayaan Daerah

Rasio pertumbuhan kekayaan daerah mengukur pertumbuhan kekayaan daerah dari tahun ke tahun atau dari periode ke periode berikutnya.

Kegunaan dari rasio ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan kekayaan suatu pemerintah daerah dari tahun ke tahun.

Metode Penelitian

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran, melukiskan, memaparkan, serta melaporkan suatu keadaan, obyek atau suatu peristiwa, dan membandingkannya dari tahun ke tahun. Dalam hal ini mendapatkan gambaran tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali apabila ditinjau melalui analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dan melalui perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Nur Indriantoro, Bambang Supomo, 2002:147). Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008-20010 dan NERACA tahun 2007-2010. APBD tersebut diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.

C. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori-teori, hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (Hadari Nawawi, 1991:133)

b. Wawancara

Dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak Sub Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali.

D. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Komparatif. Data yang berasal dari APBD dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemampuan Pemerintah Daerah untuk menilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah:

$$Rumus = \frac{PAD}{Sumber\ pendapatan\ dari\ pihak\ ekstern}$$

2. Rasio efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Daerah

a. Rasio Efektifitas

$$Rumus = \frac{Realisasi\ penerimaan\ PAD}{Target\ penerimaan\ PAD}$$

b. Rasio Efisiensi

$$Rumus = \frac{Biaya\ yang\ dikeluarkan\ untuk\ memungut\ PAD}{Realisasi\ penerimaan\ PAD}$$

c. Rasio Pertumbuhan

Menurut Setu Setyawan, (2003:109-110) rasio pertumbuhan ada empat:

(i) Rasio Pertumbuhan PAD

$$Rumus = \frac{Realisasi\ penerimaan\ PAD\ X_n - Xn_{-1}}{Realisasi\ penerimaan\ PAD\ X_{n-1}}$$

(ii) Rasio Pertumbuhan Jumlah Pendapatan

$$Rumus = \frac{Realisasi\ penerimaan\ jumlah\ pendapatan\ X_n - Xn_{-1}}{Realisasi\ penerimaan\ jumlah\ pendapatan\ X_{n-1}}$$

(iii) Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi

$$Rumus = \frac{Realisasi\ belanja\ operasi\ X_n - Xn_{-1}}{Realisasi\ belanja\ operasi\ X_{n-1}}$$

(iv) Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

$$Rumus = \frac{Realisasi\ belanja\ modal\ X_n - Xn_{-1}}{Realisasi\ belanja\ modal\ X_{n-1}}$$

d. Rasio Pertumbuhan Kekayaan Daerah

$$Rumus = \frac{Total\ Asset\ X_n - X_{n-1}}{Total\ Asset\ X_{n-1}}$$

● Keterangan:

X_n = *Tahun yang dihitung*

X_{n-1} = *Tahun sebelumnya*

Hasil Penelitian

Di tahun 2008 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah hanya sebesar 9,11%. Hal ini berarti bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam membiayai kegiatan pemerintahannya masih sangat rendah. Ini disebabkan karena PAD yang dihasilkan masih sangat kecil bila dibanding dengan sumber pendapatan dari pihak ekstern.

Tahun 2009 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengalami kenaikan yaitu menjadi 9,38%, namun kemampuan dalam membiayai pemerintahanya masih sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan sumber pendapatan dari pihak ekstern yang juga mengalami kenaikan sebesar 6,69% sedangkan perkembangan PAD hanya sebesar 9,84%.

Dan untuk tahun 2010 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 10,71% yang masih mempunyai arti bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam membiayai kegiatan pemerintahannya masih sangat rendah. Meski demikian, rasio tahun 2010 ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2009 meski hanya sedikit. Karena perkembangan sumber pendapatan dari pihak ekstern yang sebesar 8,17% dapat diimbangi dengan perkembangan PAD yang sebesar 23,54%.

1. Rasio Efektifitas dan Efisiensi

Hasil perhitungan Rasio Efektifitas dapat dilihat bahwa pada tahun 2008, Rasio yang didapat sebesar 108,71%, hal ini berarti PAD yang dapat dihasilkan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali telah melebihi PAD yang dianggarkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan penerimaan pajak, retribusi, bagian laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang seluruhnya telah melampaui anggaran yang telah ditetapkan, sehingga kinerja keuangannya dapat dikatakan sudah Efektif. Ditahun 2009 Rasio Efektifitas mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 102,55%, meski terjadi penurunan namun kinerja keuangannya masih dapat dikatakan Efektif karena masih berada diatas 100% dan realisasi penerimaan

PADnya telah dapat melampaui anggaran yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2010 Rasio yang didapat mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2009, yaitu menjadi sebesar 108,61%. Terbukti bahwa pada 3 tahun anggaran mulai dari 2008 sampai 2010 pemerintah Kabupaten Boyolali mampu mempertahankan Rasio Efektifitasnya berada diatas 100%.

b). Rasio Efisiensi

Hasil perhitungan Rasio Efisiensi dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 biaya yang digunakan untuk memungut PAD sebesar Rp 2.505.739.286 dan PAD yang berhasil diperoleh sebesar Rp 63.733.408.461. Dengan demikian diperoleh Rasio Efisiensi sebesar 3,93%. Hal ini berarti bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam mengumpulkan PAD sudah efisien karena biaya yang digunakan untuk memungut PAD lebih rendah dibanding dengan PAD yang diperoleh.

Ditahun 2009 terjadi kenaikan PAD yaitu menjadi Rp 70.004.658.137 dan Biaya yang digunakanpun juga ikut naik yaitu menjadi Rp 2.840.699.945. Sehingga diperoleh rasio efektifitas sebesar 4,05%. Yang berarti bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sudah efisien.

Ditahun 2010 PAD yang diperoleh adalah sebesar Rp 86.485.635.223 dan biaya yang dikeluarkan adalah Rp 1.973.953.050 sehingga diperoleh Rasio Efektifitas sebesar 2,28%. Yang berarti bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten boyolali dalam upayanya mengumpulkan PAD sudah efisien karena rasio yang didapat kurang dari 100%.

Dengan demikian dari tahun ke tahun Rasio Efektifitas mengalami perubahan atau bersifat fluktuatif. Yaitu ditahun 2008 yang sebesar 3,93% mengalami kenaikan menjadi 4,05% ditahun 2009, dan mengalami penurunan yang kecil yaitu menjadi 2,28% ditahun 2010. Meski demikian secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Boyolali sudah dapat dikatakan Efisien.

c). Rasio Pertumbuhan

1. Rasio Pertumbuhan PAD

PAD dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Dimulai dari tahun 2008 PAD yang hanya sebesar Rp 63.733.408.461 mengalami kenaikan ditahun 2009 menjadi sebesar Rp 70.004.658.137. Sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan PAD tahun 2009 sebesar 9,84%. Hal ini berarti bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam mempertahankan dan meningkatkan perolehan PAD dari tahun 2008 ke tahun 2009 adalah sebesar 9,84%. Pertumbuhan ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali telah berhasil mengoptimalkan kemampuannya dalam meningkatkan perolehan PAD yang ditunjukkan dengan kenaikan PAD dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Rasio Pertumbuhan Jumlah Pendapatan

Jumlah Pendapatan tahun 2008 sebesar Rp 782.528.354.413 mengalami kenaikan ditahun 2009 menjadi sebesar Rp 836.169.374.817. Sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan Jumlah Pendapatan tahun 2009 adalah sebesar 6,85%. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh besarnya sumber pendapatan dari pihak ekstern terutama berupa Dana Alokasi Umum. Besarnya sumber pendapatan dari pihak ekstern menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Boyolali masih sangat bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat.

Ditahun 2010 jumlah pendapatan juga mengalami kenaikan dibanding tahun 2009 yaitu menjadi sebesar Rp 917.898.637.498. Sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan Jumlah Pendapatan tahun 2010 adalah sebesar 9,77%. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah PAD yang diterima dan sumber pendapatan pihak ekstern yang diterima.

3. Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun 2008 sebesar Rp 663.115.703.998 mengalami kenaikan ditahun 2009 menjadi Rp 713.725.383.770. Sehingga diperoleh Rasio Perubahan Belanja Operasi tahun 2009 sebesar 12,73%. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh naiknya belanja pegawai dan belanja hibah.

Tahun 2010 Belanja Operasi juga megalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu menjadi Rp 806.507.488.699. Sehingga diperoleh Rasio Perubahan Belanja Operasi tahun 2010 sebesar 13%. Hal ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali kurang mampu mengendalikan pengeluaran daerah untuk membiayai Belanja Operasi karena pertumbuhan Belanja Operasi masih terus bertambah setiap tahunnya.

4. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

Belanja modal tahun 2008 adalah sebesar Rp 124.533.005.357 mengalami penurunan ditahun 2009 menjadi Rp 86.596.626.087. Sehingga diperoleh Rasio Perubahan Belanja Modal sebesar (30,46%). Penurunan tidak dapat mengimbangi atau bahkan melebihi Rasio Perubahan Belanja Operasi yang sebesar 12,73%. Sehingga Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dilihat dari perolehan Rasio Perubahan Belanja Modal belum dapat dikatakan baik.

Belanja modal tahun 2010 kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp 100.101.216.583. Sehingga diperoleh Rasio Perubahan Belanja Modal tahun 2010 sebesar 15,60%. Hal ini berarti bahwa Kinerja Keuangan PEMDA Kab. Boyolali sudah baik karena berhasil mengimbangi bahkan melebihi Rasio Perubahan Belanja Operasi tahun 2010 yang sebesar 13%.

d) Rasio Pertumbuhan Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah tahun 2007 sebesar Rp 1.015.400.149.660 mengalami kenaikan pesat menjadi Rp 1.752.244.003.110 ditahun 2008. Sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan Kekayaan Daerah sebesar 72,56%, pertumbuhan ini dipengaruhi oleh kenaikan di hampir seluruh komponen aktiva. Hal ini berarti kinerja keuangan PEMDA Kab. Boyolali sudah sangat baik karena berhasil meningkatkan kekayaan daerahnya.

Di tahun 2009 PEMDA Kab. Boyolali mengalami penurunan kekayaan daerah yaitu menjadi Rp 1.269.823.920.331, sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan Kekayaan Daerah tahun 2009 turun sebesar (27,53%). Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya jumlah Asset Tetap.

Sedangkan pada tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah kekayaan daerah dibandingkan tahun 2009 yang menjadi Rp 1.423.018.660.852, sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan Kekayaan Daerah tahun 2010 sebesar 12,06%. Hal ini dipengaruhi oleh bertambahnya hampir seluruh Aktiva kecuali Asset Lainnya.

BAB V

Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan Analisis Rasio Keuangan pada APBD dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali selama tahun 2008 sampai tahun 2010, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dari tahun 2008 ke tahun 2010 berubah-ubah atau bersifat fluktuatif. Dimulai dari tahun 2008 Rasio yang didapat hanya sebesar 9,11% yang berarti kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun 2008 masih rendah sekali. Tahun 2009 Rasio yang didapat mengalami peningkatan yaitu menjadi 9,38% dan masih berarti kinerja keuangannya rendah. Pada tahun 2010 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kembali mengalami kenaikan tipis yaitu menjadi 10,71% dan masih berarti bahwa kinerja keuangannya

masih tetap rendah sekali. Dengan demikian rata-rata angka rasionya adalah 9,73% masih berada diantara 0%-25%, hal ini berarti tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih sangat rendah. Sedangkan tingkat ketergantungan pada sumber pendapatan dari pihak ekstern masih sangat tinggi disebabkan karena sumber-sumber keuangan potensial negara adalah milik Pemerintah Pusat.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kebupaten Boyolali sudah berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan Analisis Rasio Keuangan daerah yaitu:
   a. Rasio Efektifitas

      Hasil dari perhitungan dapat dilihat bahwa rasio yang didapat pada tahun 2008 hanya sebesar 108,71% atau dengan kata lain sudah berada diatas 100%. Hal ini berarti bahwa kinerja keuangan Kabupaten Boyolali sudah efektif. Namun ditahun 2009 rasio keuangan mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 102,55%. Kemudian ditahun 2010 rasio keuangan kembali mengalami kenaikan menjadi 109,79%, atau dengan kata lain kinerja keuangan Kabupaten Boyolali sudah efektif. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja keuangan dibanding tahun 2009.
   b. Rasio Efisiensi

      Hasil dari perhitungan dapat dilihat bahwa Rasio yang didapat dari tahun 2008 sampai tahun 2010 kurang dari 100%. Hal ini berarti kinerja keuangan Kabupaten Boyolali sudah efisien.
   c. Rasio Pertumbuhan

      Hasil dari perhitungan dapat dilihat bahwa jumlah PAD, total pendapatan, belanja operasi, belanja modal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terus menerus, kecuali belanja modal yang sempat turun pada tahun 2009. Demikian juga untuk hasil rasionya. Untuk rasio pertumbuhan PAD mengalami peningkatan dari tahun

2009 ke tahun 2010 yaitu dari 9,84% menjadi 23,54%. Begitu juga untuk rasio pertumbuhan jumlah pendapatan juga mengalami kenaikan, yaitu yang ditahun 2009 sebesar 6,85% ditahun 2010 menjadi sebesar 9,77%. Hal yang sama terjadi pada rasio pertumbuhan belanja operasi yang mengalami kenaikan. Untuk rasio pertumbuhan belanja operasi tahun 2009 sebesar 12,73% mengalami kenaikan ditahun 2010 menjadi sebesar 13%. Sedangkan untuk rasio pertumbuhan belanja modal sempat mengalami penurunan ditahun 2009 sebesar (30,46%) kemudian mengalami kenaikan yaitu ditahun 2010 sebesar 15,60%.

d. Rasio Pertumbuhan Kekayaan Daerah

Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa jumlah asset yang dimiliki pemerintah Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun tidak selalu mengalami kenaikan. Untuk rasio pertumbuhan kekayaan daerahnya ditahun 2008 sebesar 72,56% mengalami penurunan ditahun 2009 sebesar (27,53%), namun kembali mengalami kenaikan ditahun 2010 menjadi 12,06%.

Saran

Berdasarkan simpulan yang dipaparkan diatas, dapat diberikan beberapa saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang masih rendah, oleh karena itu pemerintah harus berusaha lebih keras untuk meningkatkan PADnya. Diantaranya dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah, dengan mengawasi secara ketat terhadap kegiatan pemungutan sumber-sumber PAD sehingga penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh aparatur daerah dapat dihindari.
2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mau memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak.

3. Meningkatkan mutu pelayanan publik sehingga masyarakat menjadi puas, dengan demikian masyarakatpun akan lebih tertib lagi dalam membayar pajak maupun retribusi.
4. Mengamati daerah lain yang lebih baik kinerja keuangannya, sehingga dapat dijadikan contoh untuk meningkatkan pendapatan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Halim, 2001.” *Manajemen Keuangan Daerah*”, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

Abdul, Halim, 2002. ”*Akuntansi Sektor Publik”*, Jakarta: Salemba Empat.

Diyati, Tawang, Ningrum, 2007. *”Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2005-2007”,* Skripsi, FE UMS, Tidak Dipublikasikan.

Helfert, 1996. ”*Monetary Ratio*”. Jakarta, Salemba Empat.

Indra, Bastian, 2001. *”Akuntansi Sektor Publik”*, Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo, 2002. *”Akuntansi Sektor Publik”,* Yogyakarta: ANDI.

Nawawi, Hadari, 1991. “*Metode Penelitian”* Jakarta, Salemba Empat.

Nur, Indriantoro, Bambang, Supomo, 2002. “*Metodologi Penelitian*”, Yogyakarta, Salemba Empat.

Setu, Setyawan, 2003. *”Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Dilihat dari Perspektif Akuntabilitas”*, BALANCE, FE UMM, Vol.1.

Sony, Yuwono, Dwi, Cahyo, Utomo, H. Suherry, Zein, H. Azrafiany, AR, 2007. ”*Memahami APBD dan Permasalahannya*”, Malang: Bayu Media.

------. *Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

------. *Keputusan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*